

Peran Media Massa dalam Proses Pendidikan di Masyarakat

M. Zainuddin

Abstract: The process of education does not depend fully on the various kinds of the activities done by the formal school. Other institution that is also considered very important to build character to the society is Mass Media. This writing aims at studying the role of Mass Media especially the television of education. The main argumentation is that education should be seen as the part of the development of the national culture.

Kata kunci: peran media massa, pendidikan, masyarakat

Keberhasilan proses pendidikan tidak sepenuhnya tergantung pada berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah formal. Bahkan para ahli pendidikan yang kritis seperti Ivan Illich (1972) dan Paulo Freire (1970) menaruh curiga pada lembaga formal ini, sekolah hanya merupakan suatu mekanisme yang akan semakin membelenggu manusia, terutama mereka yang berasal dari kelas tertinggal yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil keuntungan penuh dari sistem sekolah formal.

Tanpa harus masuk pada analisis kritis yang beranggapan bahwa ada kelas yang diuntungkan dengan pembodohan yang terjadi pada kelas orang kebanyakan, agaknya kita juga perlu menerima bahwa ada banyak institusi penting dalam masyarakat yang ikut membentuk sikap dan perilaku manusia, termasuk lingkungan keluarga (masyarakat).

Berbagai kebiasaan di rumah akan berpengaruh besar pada pembentukan individu. Tetapi jika rumah tangga memberi pengaruh yang unik pada masing-masing keluarga, di lingkaran yang lebih besar akan ada institusi yang secara seragam mempengaruhi individu dalam jumlah besar apalagi anak-anak sangat peka dengan lingkungan dan mudah mencontohnya. Kurikulum nasional dan sistem pendidikan tentunya harus dilihat memiliki pengaruh seperti itu. Sampai tingkat tertentu, keseragaman sikap dan perilaku didapatkan dari sistem pendidikan yang kurang lebih sama untuk semua manusia Indonesia.

Lembaga lain yang juga sering dianggap amat penting dalam pembentukan karakter masyarakat adalah media massa. Tulisan ini berusaha menelaah peran media massa, khususnya televisi dalam pendidikan bangsa. Argumentasi utamanya adalah pendidikan harus dilihat sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan bangsa. Dan pemanfaatan televisi untuk keperluan pengembangan ini harus menjadi suatu strategi utama. Kenyataan yang jauh dari ideal di Indonesia dan model Kanada yang melihat media sebagai industri kultural dijadikan basis untuk pengembangan sebuah acuan pelibatan media dalam upaya pendidikan bangsa.

Pengaruh Media Massa

Dalam ilmu komunikasi sendiri, pandangan mengenai kekuatan media massa dalam mempengaruhi individu dan masyarakat selalu mengalami perubahan. Menurut Severin dan Tankard (2001), media massa pada awalnya (sekitar tahun 1920-an sampai 1940-an) dianggap memiliki pengaruh yang amat besar seperti digambarkan dalam teori *pseudo* yang dikenal sebagai *bullet theory*. Dalam teori ini, pengaruh media dilihat seperti sebuah peluru yang ketika ditembakkan tidak akan tertahankan dan akan masuk ke dalam obyek yang dituju. Berbagai penelitian pada tahun 1950-an telah melakukan kualifikasi terhadap pengaruh ini dan mendapatkan banyak hal lain yang

harus diperhitungkan ketika mengamati pengaruh media. Pada tahun 1960 Joseph T. Klapper dengan bukunya *The Effects of Mass Communication*, memproklamirkan pendapat dominan, media massa hanya memiliki efek yang amat terbatas pada masyarakat. Namun demikian secara gradual bermunculan penelitian dan teori-teori komunikasi baru yang akhirnya kembali melihat media sebagai institusi yang memiliki pengaruh kuat pada banyak aspek kehidupan masyarakat terutama pada anak tingkat sekolah dasar.

Sementara itu, di luar pikiran-pikiran *mainstream* di atas, pengamat budaya yang beraliran kritis dan kultural sebenarnya terus menerus yakin, media massa selalu memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Masalahnya, seperti diwakili dalam pikiran-pikiran Theodor Adorno dan kawan-kawannya (1944) media massa seperti film (termasuk televisi) tidak bekerja untuk pencerahan tetapi sebaliknya, melakukan desepsi massa untuk keuntungan pihak-pihak yang dominan. Dasar pemikiran ini melekat terus dalam kritik media yang berjalan berlainan dengan pikiran-pikiran *mainstream* dalam ilmu komunikasi.

Namun, apapun paradigmanya para ahli agaknya sepakat bahwa media merupakan lembaga yang penting untuk membentuk masyarakat. James Curran (2002) meringkas kesepahaman itu sebagai berikut: “Keyakinan bahwa media adalah agensi pengaruh yang penting secara umum. Itu benar. Tetapi, cara media menjalankan pengaruhnya sangatlah kompleks dan tidak merupakan suatu yang pasti”.

Tidak dapat dipungkiri, media massa telah berkembang demikian jauh dari masa-masa kajian Adorno di tahun 1940-an. Bersamaan dengan itu berkembang juga praktek-praktek industri termasuk pengetahuan pemasaran. Fungsi media pun semakin bergeser dari peran-peran politik dan sosial pada peran-peran ekonomi untuk menumbuhkan industri media itu sendiri maupun industri terkait lainnya. Media harus menghidupi dirinya sendiri dan biaya untuk itu makin lama makin tinggi sampai media ideal pun harus menyerah pada apa yang disebut *the primacy of economic goals* (Shoemaker dan Reese, 1996). Sehingga meski mungkin tidak perlu kita mengadopsi pikiran-pikiran konspirasi mengenai industri media (yang dengan tegas menyatakan ada kelompok yang diuntungkan melalui desepsi media), perlu juga agaknya kita memahami media yang pengaruhnya besar ini akhirnya lebih banyak berperan

sebagai institusi ekonomi yang memaksimalkan keuntungan ketimbang sebagai institusi sosial yang bisa disertai tugas mendidik.

Ukuran Kinerja Media

Pada tahun 1980-an di Amerika Serikat muncul gerakan konservatif apa yang mereka sebut “*family values*”, sebagai suatu bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya angka-angka perceraian, anak-anak yang dibesarkan hanya oleh satu orang tua, dan hal-hal negatif yang diakibatkannya. Televisi merupakan salah satu penyebab, dan dituduh berperan banyak dalam menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi kehidupan keluarga.

Demikian pula ketika tindak kekerasan serta angka kriminalitas dianggap meningkat, masyarakat Amerika Serikat lagi-lagi mencurigai televisi. Sejak laporan pada *Surgeon General* (pejabat kesehatan masyarakat) pada tahun 1972, Amerika Serikat selalu menempatkan isu pengaruh kekerasan televisi pada prioritas yang tinggi (Comstock, et.al., 1978). Berbagai penelitian dilakukan dalam memerinci pengaruh ini pada masyarakat, tetapi asumsi dasar yang berlaku umum adalah televisi terlalu banyak menayangkan bentuk kekerasan dan tayangan-tayangan itu memiliki korelasi dengan peningkatan kekerasan dalam masyarakat.

Kepercayaan serupa juga hidup secara luas di Indonesia. Meski tidak tersedia penelitian mendalam yang dilakukan untuk menegaskan hubungan sebab-akibat antara jumlah tayangan dengan jumlah perilaku anti-sosial dalam masyarakat, umumnya orang percaya bahwa televisi membawa berbagai akibat buruk pada masyarakat. Harian Kompas (2003) ketika melaporkan jajak pendapatnya menyimpulkan bahwa “televisi dinilai dapat menggiring publik untuk berada dalam posisi menerima semua sensasi mimpi dalam dunia sinetron, kekerasan, dan erotisme yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan”. Lebih jauh lagi, dalam penelitian ini sebagian besar responden membenarkan, televisi cenderung mementingkan aspek komersial.

Televisi dan pengelolanya pasti tidak bermaksud buruk. Namun, ketika pilihan-pilihan harus dibuat, para pengelola itu dengan cepat memilih untuk mendahulukan tujuan-tujuan bisnisnya ketimbang mengedepankan kepentingan publik yang luas. Masalahnya, kita belum pernah sepakat mengenai apa yang merupakan fungsi media masa, khususnya tele-

visi, dalam kehidupan berbangsa. Padahal, seperti yang dialami Amerika Serikat, kita juga sedang berhadapan dengan apa yang disebut Ben Bagdikian (1997) sebagai *The Fallacy of The Two-Model Choice*. Dengan menggunakan konsep tersebut, kita dapat melihat masyarakat terlanjur percaya, pilihan sistem televisi yang ada hanya antara sistem otoritarian-represif dan sistem kapitalis-liberal.

Sistem Orde baru yang represif menggunakan tameng radio dan televisi publik untuk menayangkan aneka kepentingan penguasa dan menghasilkan tayangan-tayangan yang tidak saja sepihak tetapi juga membosankan dan berkualitas teknis yang rendah. Bisa dikatakan, tayangan televisi masa itu membawa stigma bagi televisi publik dan tayangan pendidikan. Lepas reformasi, industri televisi dengan kreatif meramu program-program yang menarik yang tidak saja lebih enak dilihat, tetapi berhasil menunggangi euforia kebebasan berekspresi. Sampai akhirnya masyarakat mulai terusik rasa kepatasannya dan mulai menuntut utilitas yang lebih tinggi dari penggunaan ranah publik (frekuensi radio) ini.

Sebenarnya, eksperimentasi berbagai bangsa dengan sistem televisinya menunjukkan bahwa kita tidak harus memilih salah satu diantara kedua pilihan ekstrem di atas. Masih banyak bentuk yang dicobakan oleh banyak bangsa seperti Jepang dan Kanada yang pada prinsipnya mendorong televisi untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi publiknya. Simplikasi fungsi media seperti yang dikemukakan Harold Lasswell (1948) dan Charles Wright (1959) agaknya dapat dijadikan dasar untuk menilai kinerja media.

Menurut kedua peneliti tersebut, media massa memiliki empat fungsi utama. *Pertama*, media massa melakukan pengawasan lingkungan dan menjadi mata masyarakat untuk mengamati peluang dan ancaman yang ada di lingkungan setempat. *Kedua*, mengumpulkan bagian-bagian masyarakat untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada dalam lingkungan. Di sini media melakukan fungsi penghubung bagi sumber daya yang ada dalam masyarakat sehingga semua dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang maupun untuk memecahkan masalah. *Ketiga*, media meneruskan warisan sosial dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan menjadi forum tempat anggota masyarakat belajar mengenai nilai, norma, dan pola perilaku yang diterima masyarakat. Dan *keempat*, media melakukan fungsi hiburan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat kesenangan.

Sebenarnya, bila diperhatikan secara mendalam, keempat fungsi media itu merupakan dasar pendidikan masyarakat dalam arti luas. Anggota masyarakat memang harus memahami kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya, lebih dari itu mereka juga harus belajar bagaimana secara bersama mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Lalu mengapa televisi harus menjalankan fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat? Alasannya, karena berbeda dengan media cetak, televisi dan radio menggunakan frekuensi radio yang merupakan sumber daya milik publik yang terbatas jumlahnya. Dengan teknologi yang tersedia pada saat ini, hanya sedikit gelombang radio yang dapat digunakan untuk melakukan siaran televisi maupun radio. Apabila suatu frekuensi sudah dialokasikan untuk suatu stasiun televisi, misalnya, maka frekuensi itu dan frekuensi di sekitarnya tentu tidak dapat digunakan sebagai stasiun lain. Karena itu, di dunia dikenal dengan konsep *public trustee* untuk mereka yang mendapat kesempatan menggunakan frekuensi radio. Artinya, mereka yang mengelola stasiun sebenarnya hanya merupakan orang-orang kepercayaan masyarakat yang diberi tugas menggunakan frekuensi radio untuk kepentingan masyarakat tersebut.

Pada kenyataannya, situasi ideal ini tidak terjadi di Indonesia dan sebenarnya di banyak bagian dunia lain. *Rating* atau ukuran jumlah penonton yang melihat suatu tayangan pada suatu waktu tertentu, menjadi ukuran kinerja yang amat penting. Kalau saja industri media tidak berbeda dengan industri barang dan jasa lainnya, mungkin logika bisnis ini dapat diterima dengan mudah. Penyelenggaraan televisi membutuhkan dana besar. Dana itu datang dari pengiklan, dan pengiklan demi efektivitas pesan pemasarannya akan memilih program-program yang banyak ditonton orang. Menyitir Marshall McLuhan (1965), kita bisa mengatakan bahwa dalam industri televisi yang berlaku adalah *The Rating is the Message!*

Menjadi masalah bila televisi yang sering disebut bagian dari *the cultural industries* lalu menggunakan ukuran-ukuran non-budaya guna menakar kinerjanya. Masyarakat yang tidak menganggap media berperan besar dalam produksi dan reproduksi budaya lalu tidak merasa perlu untuk membebani media dan televisi dengan fungsi-fungsi sosial serta pendidikan dan cenderung bersikap menerima apa pun yang ditampilkan media. Padahal fungsi produksi budaya

tetap berjalan lancar dan paling kurang, bila kita khawatir akan pengaruh yang tidak diinginkan dari media, kita gagal memanfaatkan kekuatan media yang amat signifikan untuk kepentingan publik.

Dalam kenyataannya, dunia televisi di Indonesia terus menerus mengeksploitasi kerancuan berpikir yang hidup dalam masyarakat dengan memanfaatkan situasi yang serba tidak pasti selama pergantian sistem masyarakat yang terjadi sejak reformasi. Kebebasan berekspresi dijadikan tameng untuk mengejar keuntungan bisnis, selera yang dimanipulasi dengan teknik pemasaran diterjemahkan menjadi kebutuhan masyarakat. Ketergantungan pada ukuran *rating*, pada saat sama membuat masing-masing stasiun tidak berani keluar dari program yang sudah terbukti mendatangkan penonton. Alhasil, mengharapkan televisi menjadi pendidik pendamping bagi masyarakat menjadi harapan yang berbahaya. Mengikuti Wright (1959), televisi bukannya menekankan fungsi-fungsinya tetapi malah membiarkan tumbuh kekuatan disfungsi-fungsinya, yang potensial menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan masyarakat maupun anggotanya.

Sudah banyak dibahas mengapa dan bagaimana televisi Indonesia berubah dari instrumen penguasa menjadi instrumen pengusaha (Hidayat, 1999). Sulit untuk tidak khawatir melihat bahwa sebagai instrumen pemasaran yang baik televisi tidak sungkan-sungkan menjajakan budaya konsumerisme, kekerasan, dan erotisme (*Kompas*, 2003)

Pada jajak pendapat Agustus 2003, *Kompas* mengacu laporan Nielsen Media Research yang menunjukkan, diantara 100 program acara dengan *rating* tertinggi mencuat acara-acara hiburan yang menawarkan cerita-cerita fiktif dengan gaya hidup mewah, kesakrian dan komedi (*Kompas*, 2003). *Kompas* mencatat, acara sinetron seperti *Kehormatan*, *Angling Dharma*, *Nyi Rori Kidul*, *Bidadari 2*, dan *ABG* yang menempati *rating* tertinggi (10-13 %) pada minggu itu dengan sekitar tiga juta penonton. Pada saat sama, tayangan kekerasan yang dibungkus sebagai tayangan kriminal (*cops story*) juga mendapat perolehan *rating* yang lumayan (dari tiga sampai tujuh persen).

Secara umum, masalahnya adalah tingkat melek media atau kecerdasan bermedia (Potter, 2001) yang amat rendah diantara penonton, pengguna, maupun pengelola televisi (Gazali, 2003). Hal ini bukannya tidak didasari para pimpinan televisi besar. Lebih menengaskan lagi jika kita mendengar penuturan buda-

yawan Indonesia, bahwa para pimpinan/direktur televisi tersebut justru melarang anak-anak mereka sendiri untuk menonton tayangan-tayangan yang dipancarkan oleh stasiun televisi yang mereka pimpin. Moral ceritanya, yang penting anak-anak mereka selamat dari “pembodohan” itu, sedangkan anak-anak lain bangsa ini terserah nasibnya masing-masing (Widiastono, 2004).

SISTEM MEDIA YANG MENGUTAMAKAN PENDIDIKAN

Media, kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan yang jelas, dan bukanlah hal yang bisa dipikirkan sambil lalu. Kecenderungan kita untuk menyederhanakan kausalitas antara media dengan perubahan kebudayaan dan perilaku dalam masyarakat justru akan semakin menjauhkan kita dari pemikiran yang holistik mengenai manfaat media. Tidak terlalu penting untuk terus menguji hipotesa bahwa televisi memiliki pengaruh-pengaruh negatif. Yang lebih penting adalah memastikan televisi memberikan tayangan yang mampu mengajak masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Dalam kondisi pertelevisian kita saat ini, kita bisa berdebat apakah ketakutan, pikiran jalan pintas, kekerasan, dan gaya hidup konsumtif benar diakibatkan tayangan televisi? Tetapi, kita pasti sepakat, bahwa televisi kita tidak bisa diandalkan untuk tujuan pencerdasan bangsa.

Harusnya juga mudah untuk sepakat bahwa televisi karena menggunakan ranah publik yang terbatas pantas dimanfaatkan publik guna pengembangan masyarakat terutama dalam hal pendidikan. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mentransformasi penyiaran Indonesia menjadi instrumen pendidikan masyarakat, tetapi ada juga elemen-elemen krusial yang sudah tersedia atau tinggal direvitalisasi lagi fungsinya. Elemen-elemen dalam krusial transformasi ini adalah paradigma, komitmen nasional, visi, strategi kebudayaan, lembaga, peraturan dan program.

Paradigma yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan yang lebih luas agaknya perlu dipikirkan matang mulai sekarang. Manusia tidak hidup di ruang sekolah dan kenyataannya sekolah-sekolah kita tidak mampu menyediakan pendidikan yang setara untuk semua warga Negara. Secara holistik kita juga perlu melihat ada lembaga-lembaga penting lainnya selain sekolah, yang bisa berdampak mendukung atau bertentangan dengan pendidikan formal. Sinergi antar lembaga dan

agensi pengaruh ini hanya bisa tercapai bila paradigma yang digunakan tidak secara sempit melihat peran pendidikan dan media massa tetapi lebih menempatkannya sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan.

Kedua, transformasi media menjadi industri kultural, membutuhkan dukungan sumber daya yang signifikan dan menuntut perubahan kelembagaan yang fundamental. Pengalokasian sumber-sumber ini hanya dapat dimulai dengan signifikan bila bisa muncul konsensus nasional mengenai arah perkembangan kebudayaan kita dan bila pimpinan nasional juga menaruh keyakinan dan perhatian yang tinggi terhadap upaya ini.

Mungkin presiden orde baru yang sempat bertindak banyak dalam upaya pengembangan kebudayaan. Sayang, upaya itu tidak didasarkan pikiran-pikiran egalitarian yang memerdekakan tetapi lebih menjadi pemaksaan cara pandang dari rezim yang dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan rezim itu sendiri. Untuk komitmen pimpinan nasional pada visi ke depan, kita mungkin dapat belajar dari negara-negara tetangga di mana bekas perdana menteri Singapura dan bekas perdana menteri di Malaysia berhasil menciptakan situasi *domination by consense*, karena visi-visinya dianggap akan menguntungkan publiknya.

Karena itu, visi sebagai elemen ketiga, tidak bisa dipisahkan dari pimpinan nasional. Perjalanan bangsa kita setelah reformasi, bahkan jauh sebelumnya, tidak pernah terasa memiliki arah yang jelas. Para ahli mengeluh pendidikan dan kebudayaan tidak pernah menjadi panglima di negeri ini; sementara di negara-negara lain seperti Malaysia dan Korea melesat maju karena pendidikan menjadi amat penting di negara-negara itu. Sulit untuk menyangkal, Malaysia banyak bergerak maju karena didorong *Vision 2020* Mahathir Mohamad untuk menjadikan Malaysia sebagai negara industri yang diperhitungkan di dunia. Pembangunan pendidikan Indonesia yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan tidak bisa tidak harus dimulai dari sebuah visi yang bisa dijadikan pedoman oleh perancang pembangunan dan masyarakat luas.

Strategi kebudayaan tak habis-habisnya dibicarakan di Indonesia, meski tidak pernah berhasil muncul suatu kesepakatan yang bersifat “mengikat” pada masyarakat maupun para penyelenggara negara. Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi Sumatra Barat Oktober 2003, bahkan mengangkat strategi kebudayaan sebagai utama dalam kongres tersebut. Tetapi

ada dua kelemahan utama dalam rancangan kongres itu, yaitu strategi dilihat hanya sebagai wawasan, dan pesertanya adalah budayawan. Padahal kita harus bicara soal strategi kebudayaan yang harus dijalankan negara dan masyarakat luas secara bersama guna mengembangkan dirinya. Strategi mengandung pemahaman rencana, sistematis, dan obyektif, tanpa memiliki tujuan-tujuan kebudayaan dan pendidikan yang jelas dan tanpa ada peluang untuk implementasi, maka pembicaraan mengenai strategi kebudayaan tinggal jadi bahan obrolan menarik bagi para budayawan tanpa bisa memberi arah pada bangsa.

Dalam kelembagaan, Indonesia sudah memiliki dasar-dasarnya dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta sistem penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Meski demikian, KPI adalah lembaga yang amat baru dan masyarakat serta pemerintah belum sepenuhnya memahami konsep komisi independen yang menjalankan fungsi negara. Kekuatan politik serta kelengkapan hukum KPI juga masih terbatas sehingga pengaturan terhadap industri penyiaran belum efektif. Sebaliknya, TVRI dan RRI adalah lembaga tua yang harus mengalami transformasi karena sudah terlanjur dimanipulasi sebagai alat kekuasaan oleh pemerintah. Belum lagi kapasitas pengembangan kebudayaan masih amat rendah dalam kedua lembaga penyiaran publik itu. Dengan vitalisasi lembaga regulator dan lembaga penyiaran publik, Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar kuat untuk melakukan pengembangan kebudayaan yang berbasis media massa. Tinggal diperlukan suatu lembaga pada tingkat kementerian yang mendapat mandat besar untuk menyusun dan memfasilitasi strategi kebudayaan nasional.

Peraturan bisa dilihat sebagai dasar pembentukan lembaga dan pengembangan kebijakan serta program pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Karena itu, dalam urutan elemen ini, peraturan seharusnya bisa diletakkan sebelum pembahasan kelembagaan. Pada tingkat paling dasar dibutuhkan undang-undang untuk menjadi rancang biru (*blue print*) dan dasar hukum bagi implementasi strategi kebudayaan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sudah amat progresif dalam filosofi pengembangan penyiaran untuk kepentingan publik. Yang belum kita miliki adalah undang-undang yang menjadi dasar kebijakan negara untuk pengembangan kebudayaan. Undang-undang itu dapat dilihat sebagai perumusan visi negara mengenai

apa yang ingin dicapai Indonesia sebagai suatu bangsa dalam jangka menengah ke depan. Pada masa kini, undang-undang itu juga harus mencakup strategi dasar mengenai globalisasi, teknologi informasi, pendidikan dan kebudayaan.

Pada tataran implementasi, peraturan yang dibutuhkan adalah yang menjamin bahwa produksi industri televisi sejalan dengan strategi kebudayaan yang telah disusun secara nasional. Dengan menekankan prinsip-prinsip kebebasan berkreasi dan berekspresi, industri televisi komersial harus berorientasi pada tujuan-tujuan sosial (*the primacy of social goals*) ketika disertai mengelola pemanfaatan frekuensi radio. Dengan peraturan-peraturannya Komisi Penyiaran Indonesia dapat mengarahkan industri komersial agar terlibat dalam pengembangan kebudayaan, baik melalui kuota program-program pendidikan berkualitas, maupun melalui alokasi pendapatan usaha yang harus disisihkan untuk pengembangan program kebudayaan.

Terakhir, isi media yang anti-sosial adalah isu utama yang dibahas dalam tulisan ini. Karena itu, dengan mengikuti strategi yang dibangun, menjadi imperative untuk menyediakan isi yang mendidik dan prososial dan program serta pendanaan menjadi elemen yang amat penting. Pemerintah boleh saja (dan sudah mencoba) mengembangkan program atau isi media yang secara kultural berkualitas tinggi. Tetapi program pendanaan utamanya bertujuan mendorong makin banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam kreasi isi media yang sesuai strategi kebudayaan nasional. Sekali lagi, kalangan industri harus terlibat pengembangan program pendidikan dan kebudayaan. Dan dana-dana yang dikelola oleh pemerintah tentunya juga harus disalurkan untuk memastikan pengembangan kebudayaan mendapat tempat terhormat dalam program-program televisi.

Jelas rancang biru pembangunan kebudayaan ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan nasional dan masyarakat luas. Masalah media massa dan pendidikan memang bukan masalah sederhana. Ketika berbicara soal pengaruh media pada pendidikan, kita tidak bisa bekerja *piecemeal*, mengutak-atik satu-dua program yang dianggap tidak mendidik. Kita harus bicara soal transformasi budaya.

PROSES PENDIDIKAN DI MASYARAKAT

Para sosiolog sepakat bahwa (sosiologi) pendidikan adalah cabang dari ilmu sosiologi, dimana pusat

perhatiannya terletak pada mempelajari struktur dan organisasi pendidikan serta proses sosial yang terjadi dalam institusi atau sistem pendidikan, dan antara sistem pendidikan dengan sistem-sistem kehidupan sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Durkheim, sebagaimana yang dikutip oleh Adiwikarta (1988: 11-13) bahwa pendidikan adalah suatu fakta sosial (*social fact*), dan karenanya menjadi objek studi sosiologi.

Sosiologi pendidikan juga menganalisis pola interaksi antara sekolah dengan kelompok-kelompok sosial lain di masyarakat, antara lain: (1) analisis terhadap struktur kekuasaan di masyarakat beserta imbasnya terhadap persekolahan; (2) analisis terhadap hubungan antara sistem sekolah dengan sistem-sistem sosial lainnya di masyarakat, dan (3) struktur masyarakat beserta pengaruhnya terhadap organisasi sekolah. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek penting yang sekarang telah diakui kepentingannya, seperti tercermin dalam konsep sekolah masyarakat (*the community school*), dimana diinginkan adanya integrasi yang baik antara sekolah dengan kehidupan masyarakat yang dilayaninya (Faisal dan Yazik, t.t: 63).

Menurut Tilaar (2000: 40-42) dalam perkembangan pendidikan dewasa ini, terdapat lima aliran besar, yaitu: (a) aliran fungsionalisme, fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada. Masa depannya dipersiapkan dengan mengajarkan fungsi-fungsi dalam masyarakat masa depan. Tokoh dalam aliran ini adalah Durkheim dan Parsons; (b) aliran kulturalisme, fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya merekonstruksi masyarakat; pendidikan berfungsi menata masyarakat berdasarkan fungsi-fungsi budaya universal dengan berdasarkan budaya lokal yang berkembang ke arah kebudayaan nasional dan kebudayaan global. Tokoh dalam aliran ini adalah Brarmed dan Ki Hadjar Dewantara; (c) aliran kritis, ada dua kelompok aliran kritis yaitu penganut teori konflik dan teori kritis. Bagi penganut teori konflik, fungsi pendidikan dilihat sebagai reproduksi tatanan ekonomi yang sedang berjalan, untuk mengupayakan pemerataan ekonomi melalui perjuangan kelas. Tokohnya adalah Marx dan Bowels. Sedangkan bagi penganut teori kritis, fungsi pendidikan adalah memberdayakan kaum tertindas dengan mengembangkan keaksaraan kritis bagi rakyat banyak. Tokohnya adalah Freire, Gyroux dan Vygotsky; (d) aliran interpretatif, tugas pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-pro-

gram dalam kurikulum. Untuk masa depan, pendidikan berfungsi menghilangkan berbagai bias budaya dan kelas-kelas sosial yang membedakan antara kelompok elite dan rakyat jelata yang miskin. Tokoh dalam aliran ini adalah Bernstein; dan (e) aliran pascamodern, pendidikan masa kini adalah transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan masyarakat masa depan perlu menghargai kebhinekaan dan keragaman pendapat. Fungsi pendidikan adalah membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif. Tokoh dalam aliran ini adalah Derrida, Foucault dan Gramsci.

Menurut Ackerman dan Alcott dalam bukunya “*The Stakeholder Society*”, sebagaimana yang diku-

tip oleh Tilaar (2002: 480-481) menjelaskan bahwa masyarakat dewasa ini merupakan masyarakat yang sadar akan apa yang ingin dicapainya. Di dalam masyarakat yang demikian yang disebut sebagai *the stakeholders society* adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah nasional (pusat). Untuk itu peran media massa sangat kuat dalam mempengaruhi proses pendidikan di masyarakat.

Dalam kaitan ini perlu ada lembaga atau struktur organisasi dalam lembaga pendidikan yang mengkaji masalah perubahan sosial dalam perspektif pendidikan di masyarakat dimana masyarakat ikut berpartisipasi. Selanjutnya Tilaar (2000: 72-80) mengemukakan perbandingan antara paradigma lama dan paradigma baru dari pendidikan nasional Indonesia yang dapat

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Lama dan Baru Pendidikan Nasional Indonesia

Indikator Perkembangan Sisdiknas	Paradigma Lama	
Popularisasi pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pendidikan untuk pemutusan mata rantai kemiskinan - Mempercepat terpenuhinya pendidikan dasar untuk semua anak - Merintis pelaksanaan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kecerdasan rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pebe di - Pa da - ev - In - pe di
Sistematisasi pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem pendidikan yang baku untuk efisiensi perencanaan dan manajemen, memudahkan supervisi dan peningkatan mutu - Penyeragaman pendidikan untuk kesatuan bangsa - Etatisme pendidikan untuk menjaga mutu pendidikan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pe di - Pe - ya pe - Pr pa ba
Proliferasi pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Praktis pendidikan terjadi di sekolah dan di luar sekolah - Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat dan negara - Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan penyiapan tenaga trampil oleh sistem pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - De ko - me - ter - Pe pr ke ke
Politisasi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan alat mempertahankan ideologi/kepentingan pemerintah yang berkuasa - Pendidikan nasional yang baik dapat memecahkan masalah sosial budaya - Manajemen pendidikan ditangani oleh birokrasi untuk kesatuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pe me po - M be pe

digunakan untuk membangun masyarakat Indonesia baru, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

KESIMPULAN

Media (khususnya televisi) merupakan agensi atau lembaga penting yang amat potensial mempengaruhi penonton dan masyarakat luas terutama pengaruh ini bisa positif, bisa negatif, dan media bisa berfungsi atau berdisfungsi.

Indikator kinerja yang dipakai dalam industri televisi amat jauh dari kepentingan prososial, belum lagi jika dibicarakan soal pendidikan. Televisi mungkin bekerja keras, tetapi ia tidak bekerja untuk kepentingan kita. Terlepas dari segala apologi yang disampaikan para pemilik dan eksekutif televisi di Indonesia, situasi industri ini dari segi kepentingan masyarakat harus dilihat sebagai pemborosan ranah publik.

Situasi yang tidak menguntungkan bagi pendidikan bukanlah suatu hal yang harus kita terima begitu saja. Harus dikembangkan strategi kebudayaan yang sesuai dengan cita-cita kita sebagai suatu bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiwikarta, Sudardja, 1988. *Sosiologi Pendidikan, Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*, Jakarta: Depdikbud, Ditjen Dikti, Proyek Pengembangan LPTK.
- Bagdikian, Ben, 1996. *The Media Monopoly*, 5th ed. Boston: Beacon Press.
- Comstock, George, Steven Chaffee, Natan Katzman, Maxwell McCombs, dan Donald Robert, 1978. *Television and Human Behavior*, New York: Columbia University Press.
- Curran, James, 2002. *Media and Power*, London: Routledge.
- Freire, Paulo, 1970. *Paedagogy of the Oppressed*, 30th Anniversary Edition. New York: Continuum.
- Gazali, Effendi, 2003. "Media Literacy", *Kompas*, 3 Maret 2003.
- Hidayat, Dedy, 1999. "Media: Between the Market and the Palace", dalam Richard Baker et.al. (eds.), *Indonesia: The Challenge of Change*, Singapura: ISEAS.
- Horkheimer, Max and Theodor Adorno, 1944. *Dialectic of Enlightenment*, terj. John Cumming, New York: Herder and Herder.
- Illich, Ivan, 1972. *Deschooling Society*, New York: Harper & Row.
- Klapper, Joseph T., 1960. *The Effect of Mass Communication*, New York: Free Press.
- Kompas, 2003. "Jajak Pendapat 'Kompas': Menenggak Mimpi dan Kekerasan dari Sajian Televisi", 25 Agustus.
- Lasswell, Harold, 1948. "The Structure and Function of Communication in Society", dalam L. Bryson (ed.), *The Communication of Ideas*, New York: Institute of Religious and Social Studies.
- McLuhan, Marshall, 1965. *Understanding Media: The Extensions of Man*, New York: MacGraw-Hill.
- Potter, James, 2001. *Media Literacy*, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Severin, Werner dan James Tankard, 2001. *Communication Theories: Origins, Methods and Uses in The Mass Media*, 5th ed. New York: Longman.
- Shoemaker, Pamela dan Stephen Reese, 1996. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, 2nd ed. New York: Longman.
- Tilaar, H.A.R, 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta., 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widayasarana Indonesia
- Widiastono, Tonny D., 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wright, Charles, 1959. *Mass Communication*, New York: Random House.